



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 61.2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MALINAU TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
21. Peraturan Daerah.....
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau

Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);

22. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III SISTEMATIKA Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB III SISTEMATIKA

"Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB VIII: PENUTUP.

- (2) Perubahan Renstra.....
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam bentuk buku sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Oktober 2018.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 2 Oktober 2018.

SEKRETARIS DAERAH ,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 61.2

Lampiran : Peraturan Bupati Nomor 62.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

DAFTAR PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
1.	PERUBAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG TAHUN 2016-2021
2.	PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016-2021
3.	PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2016-2021
4.	PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021
5.	PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2016-2021
6.	PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2016-2021
7.	PERUBAHAN RENSTRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2016-2021
8.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016-2021
9.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016-2021
10.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2016-2021
11.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL TAHUN 2016-2021
12.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2016-2021
13.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021
14.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2016-2021
15.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016-2021
16.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021
17.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016-2021
18.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA TAHUN 2016-2021
19.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2016-2021
20.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2016-2021
21.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2016-2021
22.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANANTAHUN 2016-2021
23.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN TAHUN 2016-2021
24.	PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2016-2021
25.	PERUBAHAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2016-2021
26.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2016-2021
27.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN EKONOMI TAHUN 2016-2021
28.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN UMUM TAHUN 2016-2021
29.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016-2021
30.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN 2016-2021
31.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN HUKUM TAHUN 2016-2021
32.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2016-2021

33. PERUBAHAN RENSTRA.....

33.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN PERLENGKAPAN TAHUN 2016-2021
34.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2016-2021
35.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2016-2021
36.	PERUBAHAN RENSTRA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2016-2021
37.	PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2016-2021
38.	PERUBAHAN RENSTRA SEKERTARIAT KORPRI TAHUN 2016-2021
39.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MALINAU KOTA TAHUN 2016-2021
40.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MALINAU UTARA TAHUN 2016-2021
41.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MALINAU BARAT TAHUN 2016-2021
42.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MALINAU SELATAN TAHUN 2016-2021
43.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MENTARANG TAHUN 2016-2021
44.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MENTARANG HULU TAHUN 2016-2021
45.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PUJUNGAN TAHUN 2016-2021
46.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KAYAN HILIR TAHUN 2016-2021
47.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KAYAN HULU TAHUN 2016-2021
48.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KAYAN SELATAN TAHUN 2016-2021
49.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN SUNGAI BOH TAHUN 2016-2021
50.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BAHAU HULU TAHUN 2016-2021
51.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN SUNGAI TUBU TAHUN 2016-2021
52.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR TAHUN 2016-2021
53.	PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU TAHUN 2016-2021

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Oktober 2018

BUPATI MALINAU

YANSEN TP